



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 70 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
3. Sekretaris ialah Sekretaris Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
4. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
5. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut UPT Pelayanan Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
6. Kepala UPT ialah Kepala UPT Pelayanan Pasar pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
7. Satuan organisasi adalah subbagian dan kelompok jabatan fungsional pada UPT Pelayanan Pasar pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
8. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada UPT Pelayanan Pasar pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk UPT Pelayanan Pasar.
- (2) UPT Pelayanan Pasar terdiri dari:
 - a. UPT Pelayanan Pasar Kelompok I, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Godean, Pasar Kebonagung, dan Pasar Ngijon;
 - b. UPT Pelayanan Pasar Kelompok II, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Balangan, Pasar Cebongan, Pasar Gamping, dan Pasar Ngino;
 - c. UPT Pelayanan Pasar Kelompok III, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Gendol, Pasar Kemloko, Pasar Medari, Pasar Ngablak, Pasar Srowolan, Pasar Tempel, Pasar Hewan Tempel, dan Pasar Turi;

- d. UPT Pelayanan Pasar Kelompok IV, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Bronggang, Pasar Jangkang, Pasar Kejambon, Pasar Pakem, Pasar Hewan Pakem, Pasar Pucung, dan Pasar Salakan;
- e. UPT Pelayanan Pasar Kelompok V, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Condongcatur, Pasar Deggung, Pasar Gentan, Pasar Sambilegi, Pasar Setum, Pasar Sleman, dan Pasar Wonosari;
- f. UPT Pelayanan Pasar Kelompok VI, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Kalasan, Pasar Kenaran, Pasar Potrojayan, Pasar Prambanan, Pasar Hewan Prambanan, dan Pasar Tegalsari; dan
- g. UPT Pelayanan Pasar Kelompok VII, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Jombor, Pasar Monjali, Resto Manggung, Resto Mrican, dan Resto Sardjito.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Pelayanan Pasar merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Pasar yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT Pelayanan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pasar di bidang pelayanan pasar.
- (3) UPT Pelayanan Pasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelayanan pasar;
 - b. penyelenggaraan pelayanan pasar;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan keamanan dan ketertiban;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, retribusi, sarana, dan prasarana pasar;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pelayanan Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Pelayanan Pasar sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pelayanan Pasar terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pelayanan Pasar sesuai dengan keahlian.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala UPT, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 10

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai langkah pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 167/SK.KDH/A/2002 tentang Pembentukan Kelompok Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 26 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

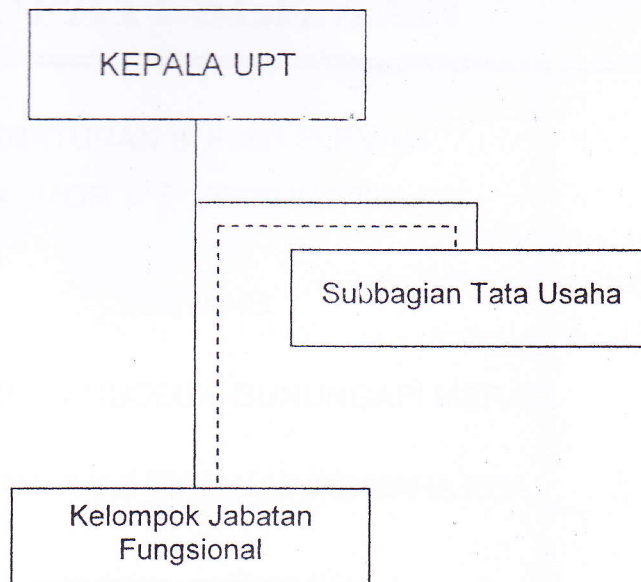
Pada tanggal 26 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PELAYANAN PASAR



- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO